

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) DI DESA SABAK PERMAI KECAMATAN
SABAK AUH KABUPATEN SIAK SRI INDRA PURA**



OLEH :

KAMARUDIN
NIM. 10775000189

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2012

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) DI DESA SABAK PERMAI KECAMATAN
SABAK AUH KABUPATEN SIAK SRI INDRA PURA**

Diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana S1 untuk Jurusan Administras Negara



OLEH :

KAMARUDIN
NIM. 10775000189

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI DESA SABAK PERMAI KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

OLEH : KAMARUDIN

Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan, dan juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin di Indoensia. Yang mana tujuan dari PNPM membantu pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipatif dengan memperkuat kemampuan kecamatan dan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Camat, FK, PJOK, UPK, Kepala Desa, TPK, FD, BPD dan Masyarakat Desa Sabak Permai dilakukan dengan teknik sensus sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang PNPM tersebut.

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden penelitian sedangkan data sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumen dan observasi. Penelitian ini berbentuk survey Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul, setelah data diperoleh dari responden penelitian dan berdasarkan data primer dan data sekunder, maka dilakukanlah pengelompokkan sesuai jenis data dan dalam bentuk tabel dengan uraian dan penjelasan.

Analisis Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, adapun hasil penelitian terhadap indikator perencanaan, pelaksanaan, pelebagaan dan pengendalian berada pada kategori “Cukup terlaksana”. Keadaan inilah tim pelaksana dan masyarakat tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan yang ada di desa Sabak Permai, sehingga dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana kurang dapat merangsang masyarakat untuk lebih giat dalam meningkatkan ekonomi mereka sebagaimana tujuan yang diharapkan Analisis Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM) tersebut.

Keyword :Pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang mana berkat Rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul ***“Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Masyarakat Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura”***.

Shalawat dan salam tak lupa penulis ucapkan buat Baginda Nabi Besar Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli surga. Amiin.

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Keluarga tercinta, Ayahnda (Alm. Suluri), Ibunda (Sriati) yang menanamkan ajaran bahwa “Hidup adalah sebuah perjuangan, setiap keberhasilan harus dilalui dengan sebuah perjuangan”, serta buat Kakanda (Siti Khotijah, Sambasi, Sayuti) serta adik-adik yang saya sayangi (Danu Siri, Sutiah),

senantiasa memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir sebagai Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
4. Bapak Drs. Almasri, M.Si, sebagai Ketua Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu demi kesuksesan mahasiswa.
6. Bapak Riki Handri Malau, SE,MM sebagai Pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
8. Bapak Suparlin selaku Kepala Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.
9. Untuk sahabat-sahabatku Edison Manulang, Fran Hardi, Yuyun Sri Wahyuni, Enri Murniati, Fika, Taufik, Roki Candra yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi Negara angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

10. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Desember 2011

Penulis,

KAMARUDIN

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1. Studi Administrasi Publik	12
2.2. Kebijakan Publik	14
2.3. Implementasi Kebijakan Publik	15
2.4. Hipotesa	20
2.5. Kerangka Pikiran	20
2.6. Defenisi Konsep	20
2.7. Konsep Operasional.....	22
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	24
3.2. Populasi dan Sampel.....	24
3.3. Teknik Penarikan Sampel.....	26
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Analisis Data	28
 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Keadaan Geografis	29
4.2. Keadaan Sosial	30
4.3. Pelaku PPK di Tingkat Kecamatan dan Desa.....	31
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Identitas Responden.....	34
5.2. Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan (PPK)	39
 BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	76
6.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura	7
5.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	35
5.2 Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur	36
5.3 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
5.4 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	38
5.5 Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana tentang Sosialisasi Perencanaan.....	47
5.6 Jumlah Responden Mengenai tim pelaksana tentang pelatihan Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.....	48
5.7 Jumlah responden mengenai tim pelaksana tentang sosialisasi Perencanaan.....	49
5.8 Dana kegiatan Analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang sarana Prasarana desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	52
5.9 Jumlah Responden tentang pencairan dana Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	53
5.10 Jumlah tanggapan responden tentang pertanggungjawaban dana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	55
5.11 Jumlah tanggapan responden tentang hasil kegiatan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai.....	58
5.12 Jumlah tanggapan responden tentang proses pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai.....	60
5.13 Jumlah tanggapan responden tentang sistem pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai	61
5.14 Jumlah responden tentang pemantauan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai	66
5.15 Jumlah responden tentang pelaporan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai	67
5.16 Jumlah responden tentang pemeriksaan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai	68
5.17 Rekapitulasi tanggapan responden tentang analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar di laksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapain tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Hal ini juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan pernah di capai secara absolut.

Pembangunan dan pembinaan massyarakat pedesaan memang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan kita semua, karena daerah pedesaan merupakan bagian intergral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun masyarakat pedesaan berarti pembangunan sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan demikian pembangunan masyarakat yang lebih serius dalam pembangunan nasional.

Begitu juga dengan pembangunan daerah, administrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Administrasi merupakan keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah di sepakati sebelumnya. Konsep administrasi dalam arti luas merupakan sebagai petunjuk bagi seseorang dalam memimpin dan mengontrol dari satu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan. White (dalam Zulkifli 2005; 19) dalam bukunya "*Introduction to the study of public administration*" mengemukakan bahwa administrasi merupakan suatu

proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia melalui berbagai lembaga untuk macam-macam kepentingan sesuai dengan di kehendaknya.

Pengertian substansial yang terkandung dalam jumlah definisi dalam konsep administrasi, dimana administrasi itu di pandang sebagai seni, keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi itu sangat terikat kepada aspek kondisi situasi, waktu dan tempat di jalankan. Dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, yaitu adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus di lakukan, adanya perlengkapan atau peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah di jalankan sejak manusia mengenal peradaban. Paradigma administrasi merupakan sebagai pelaksana kebijakan saat ini tidak relevan lagi, karena administrasi di samping mendefinisikan kebijaksanaan Negara sebagai suatu tindakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektif) dan kebijaksanaan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja, Edward dan Sharkansky (dalam Islamy 1992;18) mendefinisikan kebijaksanaan negara adalah apa yang dinyatakan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah.

Negara yang sedang berkembang yang di kenal dengan dunia ketiga tersebut menyadari bahwa semakin besarnya jurang pemerintah antara negara yang sedang berkembang, mereka berusaha untuk mengatasi masalah- masalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain dengan melakukan pembangunan di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Jadi dalam hal ini yang sangat berperan adalah administrasi pembangunan. Dalam administrasi pemerintah di Indonesia, pemerintah tidak hanya menyelenggarakan tugas rutin saja, tetapi juga menyelenggarakan tugas pembangunan. Jadi dalam administrasi pembangunan merupakan suatu ilmu yang menyoroti masalah-masalah administrasi yang harus mendapatkan pemecahan supaya kegiatan-kegiatan pembangunan yang berlangsung lebih efektif dan efesien, sehinga administrasi pemerintahan di tujukan agar menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil guna dan berdaya guna.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan, dan juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang di nilai paling miskin di Indonesia. Yang mana tujuan dari PNPM membantu pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipatif dengan memperkuat kemampuan kecamatan dan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek- proyek pembangunan.

Bahwasannya negara-negara yang berkembang yang sedang membangun bangsanya sering kali dihadapkan dengan delima pilihan antara pertumbuhan dengan pemerataan, antara pembangunan kelas menengah di perkotaan dengan pembangunan sektor pedesaan, pembangunan materi ataupun dengan non materi, ataupun pembangunan yang menitik beratkan bidang ekonomi dengan bidang non ekonomi. Memberi prioritas pada salah satu kutub berarti mengurangi perhatian kutub lainnya, sedangkan memilih kedua secara seimbang mengandung resiko penurunan tingkat kecepatan pertumbuhan. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura (PNPM) di mulai sejak tahun 2007 (siklus 4) sampai dengan sekarang, jadi Desa Sabak Permai telah mendapat dana PNPM satu (1) priode yang pertama tahun 2010 (siklus 4), SARANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, SEMENISASI JL GANG SEPAKAT RW O3/GANG KEPAA DESA.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah di laksanakan sejak awal 1, melalui berbagai program bantuan pembangunan . dari berbagai program pembangunan tersebut, program impress desa tertinggal (IDT) yang di tuangkan dalam impres nomor 5 tahun 1983 tentang upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan sejak awal pelita 1, melalui program bantuan pembangunan. dari berbagai program pembangunan tersebut, program inpres desa tertinggal (IDT) yang dituangkan dalam inpres nomor 5 tahun 1993 tentang upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan

melalui pemberdayaan masyarakat. Tepat pada tahun 1998, bersamaan dengan adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, maka di buat program pengembangan kecamatan tahap pertama (PNPM tahap 1) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan inpres nomor 5 tahun 1993. Pada tanggal 30 Juni 1999, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Deputi Kepala Bappenas Bidang Regional dan Daerah) selaku ketua tim pengarah P3DT/PNPM Pusat, mengeluarkan surat nomor 4079/D. V/06/99 mengenai pedoman umum bantuan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sumber dana PNPM berasal dari pemerintah (berupa rupiah APBN/APBD, dan pinjaman luar negeri) dan lembaga swasta dan swadaya masyarakat. Dana bantuan PNPM dapat dikategorikan menjadi dana bantuan langsung kepada masyarakat, dana bantuan operasional kegiatan, dana bantuan manajemen, dan dana pembinaan administrasi proyek. Dan dana bantuan langsung kepada masyarakat, dana bantuan operasional kegiatan, dan bantuan manajemen merupakan dana pinjaman pemerintah RI dari bank dunia (Loan IBRD 4330). Sedangkan dana pembinaan administrasi sumber dari APBN dan APBD. Selain itu dalam pelaksanaan itu dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan juga terdapat dana bersumber dari swadaya masyarakat.

Dengan di keluarkan kebijakan otonomi daerah yaitu undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah PNPM merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat, yang kemudian diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena

persepektif pemberdayaan masyarakat dan sekaligus pemberdayaan pemerintah lokal, dengan menyangkut pergeseran kekuasaan pengambilan keputusan publik, dari pola sentralisasi menuju pola desentralisasi. Jadi pelaku-pelaku PNPM itu mulai dari Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Berdasarkan surat Dirjen PMD Depdagri No. 414.2/406/PMD tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM tertanggal 15 Maret 2005. Perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ini mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat desa.

Namun, ditinjau dari kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu:

1. Sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung dan lain-lain yang sifatnya infrastruktur.
2. Kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha yang terdiri dari: usaha ekonomi produktif (UEP), yaitu aktifitas masyarakat pedesaan di sektor riil biasanya berupa usaha yang memproduksi suatu bahan, bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk jasa.
3. Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat, kegiatan ini meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pelatihan dan bantuan manajemen untuk peningkatan kapasitas masyarakat.

Tabel 1.1: Rencana Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Didesa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura

NO	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi
1	Sarana/prasarana pengerasan jalan desa sepanjang 2100 meter	Rp.85.000.000	Tidak terlaksana
2	Simpan pinjam perempuan	Rp.10.000.000	Rp. 10.000.000
	Jumlah	RP. 95.000.000	Rp. 10.000.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Sabak Permai, 2010

Berdasarkan rapat musyawarah desa pemilihan jenis kegiatan yang diusulkan oleh desa adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sarana/prasarana pagar kawat perkebunan masyarakat sepanjang 1100 m. Adapun susunan tim pelaksana ditunjuk oleh masyarakat adalah terdiri dari ketua pelaksana kegiatan, sekretaris, dan bendahara ditambah fasilitator desa. Dengan adanya kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan penghasilan perkebunan masyarakat sehingga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Berdasarkan survei di lapangan maka di temui fenomena-fenomena Sebagai berikut : Belum menyeluruh dan meratanya manfaat yang di rasakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM yaitu bangunan dapat dilihat dari sarana/prasarana yang juga belum terpenuhi. Penulis mewawancarai dengan masyarakat, masih banyak terkendala pembangunan di desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh selain pengerasan jalan dan dana simpan pinjam yang tertera pada tabel di atas. Seperti: penanggulangan kemiskinan, dll.

Sedangkan, tidak berlanjutnya dana kegiatan simpan pinjam (SPP) yang ada di desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Disalahartikan dana kegiatan SPP oleh masyarakat (ibu rumah tangga), dimana terjadinya pembagian rata dana kegiatan SPP terhadap anggota IRT (Wirid Yasin).
2. Dengan dibagi ratanya uang tersebut, menyebabkan jumlah dana sangat relatif kecil .
3. Terjadinya tumpang tindih program pemerintah seperti kelompok tani kecil (KPK) dimana dana relatif lebih besar dan sistem pengembaliannya lebih mudah.
4. Tidak jelasnya pengalokasian bantuan desa secara terperinci, disebabkan tidak terbukanya camat dan kepala desa akan bantuan dana yang diterima.
5. Kurangnya perhatian camat dan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan kecamatan dan desa khususnya dalam peningkatan sarana dan pra sarana.

Dengan adanya masalah-masalah yang di kemukakan di atas, sehingga masyarakat setempat tidak menikmati kesejahteraan hidup yang berada di kampung seperti : desa Sabak Permai, Desa Bandar Sungai, dan Desa Bandar Perdada. Hal ini dikarenakan usulan-usulan proposal yang diajukan oleh masyarakat desa Sabak Permai tidak ditanggapi dari pihak Kabupaten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura”**.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai salah satu birokrasi yang merupakan pusat pemerintahan Pelayanan publik Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu diawali dengan perencanaan yaitu penyiapan masyarakat guna memberikan informasi dan sosialisasi mengenai konsep dan kebijakan PNPM kepada masyarakat luas. Hal ini dimaksud agar masyarakat betul-betul mempunyai pemahaman yang sama secara benar mengenai konsep, prinsip-prinsip, mekanisme pengelolaan PNPM secara benar, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini dilakukan mulai tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten, Desa, sampai dengan tingkat dusun atau kelompok masyarakat sasaran atau penerima manfaat.

Namun pada kenyataan, sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang masalah, bahwa kurang tepat sasaran dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dengan Adanya permasalahan-permasalahan yang kesemuanya menyebabkan kurang pencapain tujuan dari PNPM tersebut, maka dengan itu dapat di rumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :
“Bagaimanakah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang di laksanakan di desa Sabak Permai Kecamatan sabak Auh Kabupten Siak Sri Indrapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini di harapkan dapat serta pandangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan di desa Sabak Permai.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Sabak Permai dalam melaksanakan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisaan

Dalam sistematika penulisan ini akan di uraikan bab-bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang berhubungan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HEPOTESIS

Dalam bab ini akan di bahas mengenai teori yang akan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang hal-hal yang berhubungan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang sejarah singkat Kecamatan Sabak Auh dan desa Sabak Permai yang penulis serta teliti serta struktur organisasi desa dan tingkat partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di bahas tentang: penyajian data, korelasi antar variabel dan kemudian membahas data yang di sajikan

BAB VI : KESIMPULAN

Dalam bab ini akan di berikan suatu kesimpulan dan saran, terhadap permasalahan di hadapi oleh desa Sabak Permai.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Studi Administrasi Publik

Bertitik tolak dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas, maka untuk mengendalikan dan memenuhi aneka ragam kebutuhannya, suka atau tidak suka kembali dia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lain. Dapat di pahami pameo klasik bahwa kehidupan manusia tidak berarti tanpa kehadiran orang lain disisinya .

Administrasi sebagai salah satu cabang satu cabang studi ilmu sosial, administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli 2005;17), mengatakan bahwa administrasi adalah fungsi kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.

Menurut siagian (dalam Zulkifli 2005;19), administrasi keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut silalahi (dalam Zulkifli 2005;20), administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efesiansi organisasi, aspek-aspek di maksud meliputi :

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya Manusia

Menurut Gullick (dalam Sufian 2003;3), mengemukakan administrasi adalah sistem pengetahuan manusia untuk mengetahui dan memahami antara sesamanya, meramalkan akibat-akibatnya, dan mempengaruhi hasil-hasilnya pada suatu keadaan di mana orang-orang bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan bersama, jelas bahwa ilmu administrasi adalah salah satu spesialisasi ilmu sosial yang memplajari tentang kerjasama manusia di dalam mencapai tujuan.

Menurut White (dalam sufian 2003;8), administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Menurut Handoko (dalam sufian 2003;180), manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai

tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Follet (dalam Sule & Saefullah 2005;5), mengatakan manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain .

Selanjutnya menurut Terry (dalam mukijat, 2000;15), mengatakan perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di usulkan, di anggap perlu untuk dicapai hasil yang di inginkan.

Admosudirjo (dalam mukijat, 2000;17) mengemukakan perencanaan:

- a. Aktifitas-aktifitas (pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang akan dicapai apa saja yang harus dijalankan urutannya, fasilitas-fasilitas apa yang diperlukan).
- b. Membuat pasti (untuk dicapai atau dijalankan) segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor-faktor berada dalam kekuasaan.
- c. Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi daripada badan usaha (unit organisasi).

2.2. Kebijakan Publik

Pendapat yang menyatakan bahwa tugas administrator Negara semata-mata menjalankan kebijakan publik ternyata tidak relevan lagi. Kerena dengan semakin besar tanggung jawabnya administratif dari administrator negara, maka selagi ia memainkan peran instrumental (melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus merupakan kebijakan tersebut, maka ia juga akan memainkan peran politik. Indikator yang menunjukkan peran ini juga cukup banyak dengan kata lain

administrasi Negara tidak melepaskan dirinya dari kewajiban dan tanggung jawab politik. Car Frederick (dalam Thoha 2005: 61), mengatakan kebijakan adalah suatu tujuan ,saran, atau keinginan.

Menurut Dye (dalam Islamy 2004;18), kebijaksanaan negara adalah dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifitas) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah itu saja.

James Anderson (dalam leo agstino 2006;7), mendirikan definisi kebijakan publik dalam bukunya “*public policy making*” sebagai berikut: serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dunn (1995; 49), mengatakan melaksanakan kebijakan yang di lakukan, adapun indikasinya adalah :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. Penilaian.

2.3. Implementasi Kepijakan Publik

Dalam model implementasi ini di kembangkan oleh Van Meter dan Van Hom (1975), yang di sebut sebagai A model of the policy Implementasi Proces (Model proses Implementasi Kepijakan), bahwa dalam teorinya beranjak dalam

argument perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan, dan akan di pengaruhi sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dalam implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (performance), bahwa kedua ahli ini menegaskan pendiriananya dalam perubahan, Control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dan prosedur-prosedurnya bisa memanfaatkan konsep-konsep implementasi tersebut. Maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme control pada setiap jenjang struktur! (hal ini menyangkut kekuasaan yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan), seberapa pentingkah rasa keterkaitannya masing-masing orang dalam organisasi? (hal ini menyangkut masalah kepatuhan), atas dasar pandangan Van Meter dan hom kemudian berusaha membuat tipologi kebijaksanaan.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), merupakan suatu kebijakan pemerintah tentang bantuan dana bergulir, bantuan penyediaan prasarana dan sarana yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin, di mana tujuanya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi pedesaan. Dengan demikian dengan penanggulangan kemiskinan struktural

maupun cultural dapat dilakukan dengan secara bertahap.

Karena dalam prakteknya, setiap pekerjaan memerlukan organisasi yaitu sekumpulan orang-orang dalam pekerjaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain dengan beberapa tahapan tersebut bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengadilan. Sebagaimana di kemukakan oleh Nickels, McHugh (dalam Sule 2006; 6), manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan dan pengadilan orang-orang serta sumber organisasi lainnya.

Setiap kebijakan tertentu tidak mungkin di biarkan begitu saja, tanpa ada pengawasan dan penilaian (evaluasi) yang serius. Di mana tujuan dari pengawasan dan penilaian (evaluasi) tersebut untuk kesempurnaan pencapaian sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut. Maka dalam hal ini Terry (dalam Mukijati 2000; 55), mengatakan pengawasan adalah menentukan apa yang telah di capai, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan perbaikan apa bila diperlukan untuk menjamin hasil yang sesuai dengan rencana.

The Liang Gie (dalam Mukijati 2000; 57), juga mengatakan pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana, pemerintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan.

Siagian (dalam Mukijati, 2000; 61), mengatakan penilaian (evaluasi) merupakan fungsi organik administrasi dan manajemen yang telah berakhir yang mempunyai arti proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya di capai dengan hasil-hasil seharusnya di capai.

Menurut Lubis (1985;150), evaluasi merupakan pembuatan kesimpulan atas dasar fakta dalam sebuah laporan yang mengarah pada :

1. Sebab timbulnya penyimpangan terhadap rencana
2. Pengaruh ketimpangan itu terhadap pencapaian tujuan serta target keseluruhan.
3. Pengaruh dari target bagian yang telah di capai serta perkembangan baru di lapangan.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya, Menurut Anderson (dalam Ismaily 1988;6), evaluasi kebijakan secara singkat dapat diartikan sebagai penilaian dan pengukuran kebijakan termasuk, isi, implementasi dan dampaknya.

Secara sederhana Dunn (dalam Agustino 2006;187), menerangkan evaluasi Kebijakan yaitu berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Adapun fungsi dari evaluasi kebijakan dapat dijabarkan disini yaitu evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, sejauh mana tujuan, tindakan yang di tempuh, serta efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan juga untuk memberikan sumbangsih untuk mencapai tujuan dan target, Serta memberikan sumbangan mengenai aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino 2006; 185), evaluasi di tujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Menurut Jones (dalam Islamy, 2004; 112), mengatakan penilaian kebijaksanaan merupakan suatu aktifitas yang di rancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objektif; teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Dapat kita pahami disini, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Menurut Dunn (dalam Nugroho 2004;185), evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (ranting), dan penilaian (assessment). Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan dengan pada kinerja dari kebijakan.

Siagian berpendapat (dalam Riyadi dn Kusumah 2005; 263), evaluasi merupakan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya di capai, dengan hasil yang seharusnya di capai.

Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat di capai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan. Maka menurut Nurccholis (2005; 169), evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu.

Menurut buku petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), (2005;13), adapun yang menjadi alur kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), adalah Perencanaan: Pelaksanaan, Pelestarian dan Pengendalian kegiatan.

2.4. Hipotesis

Evaluasi Pembangunan merupakan suatu daerah sangat ditentukan oleh berbagai pihak serta yang terpenting adalah pelaksanaan yang dibuat itu sendiri yang disertai dengan berbagai program yang telah dibuat. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut: “ *Diduga Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan di Desa Sabak Permai mengevaluasikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.*

2.5. Kerangka Pikiran

Berdasarkan teori yang telah di uraikan dalam studi kepustakaan, maka kerangka pikiran merupakan kajian kepustakaan sebagai jawaban teoritis, adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, Pelembagaan dan pengendalian.

2.6. Definisi Konsep

Dalam Penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu studi evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di mana variabel ini terdiri dari empat indikator yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, pengendalian dan masing-masing indikator ini memiliki beberapa

item penilaian.

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilai serta menghindari salah pengertian, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang konsep-konsep Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi kebijakan dalam penulisan ini adalah melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui dan apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan data menghasilkan dampak yang diinginkan terhadap kesejahteraan masyarakat, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan bagian upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program yang dirancang dengan pendekatan yang lebih dengan konprehensif dengan titik tekan pada upaya pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat menerima bantuan di berikan dengan kebebasan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan masyarakat, di mana prioritas utama PNPM adalah masyarakat miskin/kurang mampu sehingga dengan dana PNPM ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat .
- b. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masyarakat yang akan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan serta sasaran dari Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

- c. Pelaksanaan kegiatan adalah merupakan pelaksanaan seluruh rencana yang telah di sepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa penetapan usulan dan musyawarah desa dan informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.
- d. Pelembagaan adalah mengarahkan kepada adanya pemeliharaan dan pengembangan berbagai sarana prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus di manfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.
- e. Pengendalian PNPM dilakukan melalui pemantauan, pelapor, dan pemeriksaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan baik kegiatan sedang berlangsung maupun kegiatan yang sudah selesai.
- f. Jenis kegiatan PNPM dalam penelitian ini adalah sarana/prasarana bantuan dua ratus lima puluh ekor kambing dan bantuan dua puluh unit tenaga surya di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh .
- g. Dalam sarana dan prasarana dalam hal ini, infrastruktur yang di maksud adalah dalam penelitian ini khusus pada sarana/prasarana pengerasan jalan desa.
- h. Prasarana untuk mendukung pemerataan pembangunan fisik (infrastruktur) di masyarakat dalam penelitian ini adalah tujuannya untuk kelancaran masyarakat aktivitas dengan baik.

2.7. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana memberi suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apasaja sebagai pendukung untuk dianalisis variabel-

variabel tersebut. Dalam penelitian ini di lakukan pengukuran terhadap variabel penelitian yaitu Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan pengukuran terhadap indikator penelitian yakni perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan, dan pengendalian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sriindrapura. Adapun pertimbangan penulis memilih Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang ada, karena di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh belum terlaksananya kegiatan Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), secara maksimal, menyeluruh dan merata bagi kepentingan masyarakat. Maka untuk itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

3.2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Camat, FK, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Tim UPK, Kepala Desa, Fasilitator Desa, BPD, TPK, dan masyarakat yang menerima dan merasakan langsung dana kegiatan PNPM.

Dalam Penelitian ini yang menjadi informasi adalah Camat, Kepala Desa, BPD.

Tabel 111.1 : Keadaan unit Populasi dan sampel Penelitian Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura

NO	Unit Populasi	Jumlah		Persentase
		Unit Populasi	Sampel/Responden	
1	CAMAT	1	1	100%
2	Fasilitator Kecamatan	1	1	100%
3	PJOK	1	1	100%
4	UPK	3	3	100%
5	KEPALA DESA	1	1	100%
6	TPK	3	3	100%
7	FD	2	2	100%
8	BPD	9	9	100%
Jumlah		21	21	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Sabak Permai 2010

3.3.Teknik Penarikan Sampel

Adapun Teknik Penarikan Sampel dalam penelitian ini adalah di lakukan dengan cara:

- a. Untuk Camat, Fasilitator Kecamatan (FK), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Fasilitator Desa (FD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di lakukan dengan teknik sensus yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu semua orang yang mengetahui tentang pelaksanaan PPK tersebut.
- b. Dari jumlah 244 KK di ambil sebanyak sampel 100 KK, dengan teknik sensus yaitu semua masyarakat yang mengetahui dan mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.

3.4. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Data Primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden bagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.
- b. Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literatur, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan penjelasan jenis dan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indra Pura.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data dan informasi yang lebih valid, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

a. Wawancara

Dalam Penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis, yang di jadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.

b. Quisioner (angket)

Selain wawancara penulis juga menggunakan Quisioner sebagai alat pengumpulan data yaitu penulis membagikan sejumlah pertanyaan kepada responden tentang PNPM dan apabila responden kurang paham atau tidak bisa membaca maka peneliti langsung membacakan pertanyaan tersebut.

c. Observasi

Merupakan peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap semua objek kegiatan PNPM untuk mendapatkan data dan informasi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupate Siak Sri Indrapura .

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul, setelah data yang di peroleh dari responden penelitian dan berdasarkan data primer dan data sekunder, maka di kelompokkan sesuai jenis data dan dalam bentuk tabel dengan uraian dan penjelasan.

$$n = \frac{n}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Besar populasi, asumsi tim pelaksana dan masyarakat sebesar 244

e = Nilai kritis (batas ketelitian yang diinginkan (persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan penarikan sampel) sebesar 10%.

$$n = \frac{244}{1 + 244 (0,01)}$$

$$n = \frac{244}{245}$$

$$= 99,59 = 100$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis

Masalah penduduk di Desa Sabak Permai sama halnya dengan permasalahan penduduk di desa lainnya yaitu bagaimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang terkendali.

Pgrogram kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan masa usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Desa Sabak Permai merupakan salah satu desa dari 9 desa yang terdapat dikecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Luas Desa adalah 25,52 KM dengan jumlah penduduk tahun 2009 berjumlah 963 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 489 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 474 jiwa dengan jumlah 244 Kepala Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah secara administratif adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Apit
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Siak Kecil
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paket J.

Desa Sabak Permai terdiri dari tiga dusun, yaitu:

1. Desa Sabak Permai
2. Desa Bandar Sungai
3. Desa Pedada.

4.2 Keadaan Sosial

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Siak Sri Indra Pura pada umumnya, Desa Sabak Permai pada khususnya dalam publikasi ini disajikan data pendidikan meliputi data SD, SLTP, dan SLTA.

b. Sarana Pendidikan

Jenis sarana pendidikan di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Menurut jenis sekolah yaitu SD sebanyak 2 (dua) buah dan Madrasah/ MDA sebanyak 3 (tiga) untuk SLTP sebanyak 1 (satu) buah dimana Desa Sabak Permai tidak mempunyai/memiliki sarana pendidikan untuk tingkat SLTA.

c. Agama

Kehidupan beragama di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, dalam keadaan rukun dan damai antara sesama pemeluk agama. Dimana jumlah sarana peribadatan di Desa Sabak Permai sebanyak 4 (empat) buah, yaitu Mesjid sebanyak 1 (satu) buah dan Mushalla sebanyak 3 (tiga) buah. Masyarakat Sabak Permai mayoritas memeluk agama Islam.

4.3 Pelaku PNPM di Tingkat Kecamatan dan Desa

Camat atas nama Bupati berfungsi sebagai Pembina pelaksanaan PNPM oleh Desa-Desa di wilayah Kecamatan.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) merupakan kasih pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM di Kecamatan.

Fungsi dan peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM ditingkat antar Desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan Kecamatan.

Fasilitator Kecamatan (FK) mempunyai tugas dalam penanganan masalah dengan melakukan analisa pemecahan masalah sampai strategi tindakan yang harus dilakukan, berkoordinasi Kabupaten dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka pemecahan masalah ditingkat Desa. Melaporkan

setiap permasalahan yang muncul dan tindak lanjut penanganannya kepada jenjang di atas.

Konsultan dan fasilitator pendamping sangat besar terhadapnya dalam memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penanganan masalah, termasuk pemantauan terhadap proses penanganannya.

Kepala Desa mempunyai fungsi dan peran sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM di Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM. TPK terdiri dari ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan Desa, memberi komando pelaksanaan kegiatan lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan bendahara adalah membantu ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.

Fasilitator Desa (FD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tim penulis usulan dipilih melalui musyawarah Desa, adapun tujuan dilaksanakannya musyawarah Desa adalah untuk mensosialisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada masyarakat, serta memilih Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Fasilitator Desa (FD) mempunyai tugas penting yaitu memfasilitasi masyarakat dalam penanganan permasalahan yang terjadi di desanya. Dalam memfasilitasi suatu penanganan masalah perlu ditumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk selalu memantau atau melaksanakan kontrol terhadap setiap

langkah penanganannya. Untuk lebih memastikan penanganan masalah tetap mengacu pada prinsip dan prosedur, maka setiap ada permasalahan dan tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan oleh Fasilitator Desa (FD) agar dilaporkan kepada Fasilitator Kecamatan (FK).

Sedangkan BPD mempunyai tugas sebagai lembaga pemantau kegiatan yang berada ditingkat Desa. Pendamping lokal mempunyai tugas dalam setiap penanganan permasalahan yaitu membantu dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, proses klarifikasi, uji silang, investigasi dan penyiapan agenda pertemuan masyarakat Desa sebagai salah satu media pemecahan masalah.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari tim pelaksana dan masyarakat yang terpilih menjadi sampel untuk memberikan penjelasan mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, baik dalam bidang Sarana Prasarana maupun Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun responden yang disebarkan sebanyak 38 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian telah dikumpulkan sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan tanggapan responden tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Baik bidang Sarana Prasarana maupun Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

5.1. Identitas Responden

Adapun data-data tentang responden meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang Nama, Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan yang disebarkan kepada 38 responden yang terpilih.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para responden yang menilai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, baik dalam

bidang sarana prasarana maupun simpan pinjam perempuan (SPP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tim pelaksana	9 (69,2%)	4 (30,7%)	13 (100%)
Masyarakat	14 (56 %)	11 (4%)	(25 (100%))
Jumlah	23	15	38
%	60,5	39,4	100

Sumber : *Data Olahan 2007*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari tim pelaksana lebih dominan berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 9 orang dengan persentase (69,2%) sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orag dengan persentase (30,7%). Sedangkan untuk responden masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang dengan persentase (56%) dan responden berjenis perempuan sebanyak 11 orang dengan persentase (44%). Maka jumlah keseluruhan dari responden tim pelaksana berjumlah 13 orang sedangkan jumlah responden dari masyarakat berjumlah 25 orang.

Berdasarkan teknik penarikan sampel purposive sampling yaitu responden laki-laki lebih banyak mengetahui tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dibandingkan dengan perempuan.

2. Kelompok Umur

Kelompok umur adalah golongan usia dari responden yang sudah terpilih yaitu masyarakat dan tim pelaksana untuk menilai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Baik bidang sarana prasarana maupun simpan pinjam perempuan (SPP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Responden	Kelompok umur (tahun)			Jumlah
	20-29	30-40	>40	
Tim pelaksana	3 (23%)	4 (30,7%)	6 (46,1%)	13 (100%)
Masyarakat	-	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)
Jumlah	3	7	28	38
%	10,5	18,4	73,6	100

Sumber : *Data Olahan 2007*

Dari tabel V.2 berdasarkan kelompok umur di atas dapat dilihat bahwa responden dari tim pelaksana pada tingkat umur 20-29 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase (23%) sedangkan jumlah responden pada tingkat umur 30-40 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase (30,7%) dan jumlah responden di atas >40 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase (46,1%). Dapat kita lihat dari responden masyarakat pada tingkat umur 30-40 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase (12%) sedangkan pada tingkat umur >40 ke atas sebanyak 22 orang dengan persentase (88%).

3. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden yang melakukan penilaian terhadap Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, baik bidang sarana prasarana maupun simpan pinjam perempuan (SPP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Responden	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	D III	S1	
Tim pelaksana	-	-	1 (7,6%)	8 (61,5%)	1 (7,6%)	3 (23%)	13 (100%)
Masyarakat	9 (36%)	6 (24%)	6 (24%)	2 (8%)	-	2 (8%)	25 (100%)
Jumlah	9	6	7	10	1	5	38
%	23,6	15,7	18,4	26,3	2,6	13,1	100

Sumber : *Data Olahan 2007*

Dari tabel V.3 berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa 1 orang jumlah responden dari tim pelaksana dengan persentase 7,6% tamat SLTP, sebanyak 8 orang tamat SLTA dengan persentase 61,5% sebanyak 1 orang tamat Diploma dengan persentase 7,6%, dan sebanyak 3 orang tamat Sarajana dengan persentase 23%. Sedangkan untuk jumlah responden masyarakat sebanyak 9 orang tidak tamat SD tetapi semua bisa tulis baca dengan persentase 36%, sebanyak 6 orang tamat SD dengan persentase 24%, sebanyak 6 orang tamat SLTP dengan persentase 24% dan 2 orang tamat Sarjana dengan persentase 8%. Dan selanjutnya dapat kita lihat jenis pekerjaan responden tim pelaksana dan

masyarakat desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.

4. Jenis Pekerjaan

Adapun yang menjadi latar belakang dijadikannya jenis pekerjaan dalam item pertanyaan adalah karena pekerjaan responden sehari-hari dapat juga menjadi faktor pendukung pembangunan yang dilaksanakan di desa. Dengan terpenuhinya tingkat perekonomian yang standar di desa Sabak Permai akan memberikan kontribusi peran serta dalam menata dan mengurus desa dengan program pembangunan desa.

Di bawah ini disajikan jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel V.4 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden	Jenis Pekerjaan			Jumlah
	Tani	Swasta	PNS	
Tim pelaksana	-	9 (69,2%)	4 (30,7%)	13 (100%)
Masyarakat	19 (76%)	4 (16%)	2 (8%)	25 (100%)
Jumlah	19	13	6	38
%	50	34,2	15,7	100

Sumber : *Data Olahan 2007*

Berdasarkan tabel V.4 di atas, dapat dilihat bahwa responden tim pelaksana dengan jenis pekerjaan yang paling banyak wiraswasra sebanyak 9 orang dengan persentase 69,2% dan jenis pekerjaan PNS sebanyak 4 orang dengan persentase 30,7%, sedangkan jenis pekerjaan untuk responden masyarakat yang dominan adalah tani dengan jumlah 19 orang dengan persentase 76%, jenis pekerjaan wiraswasta responden masyarakat sebanyak 4 orang dengan persentase

16% sedangkan untuk jenis pekerjaan PNS sebanyak 2 orang dengan persentase 8%. Jadi jumlah keseluruhan dari responden masyarakat berjumlah 25 orang dan responden tim pelaksana sebanyak 13 orang, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 38 orang. Dalam penelitian ini yang menjadi responden dominan masyarakat petani sebagaimana sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan masyarakat Sabak Permai juga mayoritas pekerjaannya petani.

5.2. Analisis Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Alur kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) meliputi tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelestarian/pemeliharaan, dan pengendalian kegiatan. Sebelum memulai tahapan perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan di Kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah :

- a. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM ditingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PNPM.
- b. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai PNPM tahap sebelumnya.
- c. Inventarisasi dokumen pembangunan desa.
- d. Inventarisasi dan kependudukan, program salin PNPM yang akan masuk ke desa.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PNPM secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM disemua tingkat sebagai upaya untuk

mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

1. Perencanaan

Musyawarah antar desa sosialisasi adalah merupakan forum pertemuan antar desa untuk mensosialisasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Adapun Perencanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan desa sabak permai? *Bahwasanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat masih dalam tahap pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, tetapi dalam bidang infrastruktur masih dalam proses pelaksanaan, (wawancara dari staf pegawai desa sabak permai sebanyak lima orang).*

Tersosialisasinya tentang informasi pokok PNPM meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan., organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan, terinformasinya rencana program atau proyek dari Kabupaten atau dari pihak lain yang benar-benar akan dilaksanakan di Kecamatan dan desa, terinformasinya kategori kinerja dan ketentuan yang akan diberlakukan terhadap UPK yang terbentuk pada tahap PNPM sebelumnya.

Terbentuknya forum musyawarah antar desa meliputi terpilihnya pengurus forum, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan forum dan penetapan anggota tim pengurus, terbentuk badan pengawas UPK, kesepakatan waktu penyusunan detail desain dan RAB usulan kegiatan, apakah akan dilakukan sebelum atau sesudah MAD prioritas usulan, kesepakatan jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan, tersusunnya rencana penggunaan stimulan dana operasional kegiatan.

Untuk mengetahui tentang musyawarah antar desa (MAD) sosialisasi yang dilakukan pihak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa sabak permai? Masih banyak mengetahui sebagian masyarakat dan masyarakat ikut serta dalam musyawarah dalam forum pertemuan,(wawancara ddengan masyarakat sebanyak lima orang).

Adapun MAD sosialisasi terdiri dari :

- a. Enam orang wakil perdesa : Kepala desa, 2 orang wakil BPD / nama lain yang sejenis, dan tiga orang tokoh masyarakat minimal 3 orang dari keenam wakil tersebut adalah perempuan dari semua desa di Kecamatan.
- b. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Adapun nara sumber dalam pertemuan MAD sosialisasi adalah : TK PNPM Kabupaten, Camat dan Instansi tingkat kecamatan terkait. Sedangkan fasilitator pertemuan adalah PJOK UPK dan FK. Sumber pendanaan berasal stimulan Dana Operasional Kegiatan (DOK) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan swadaya desa atau Kecamatan.

Adapun musyawarah desa sosialisasi merupakan forum pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di tingkat desa. Dalam musyawarah desa sosialisasi terdiri dari beberapa peserta diantaranya sebagai berikut : kepala desa dan aparat desa, anggota badan perwakilan desa, tokoh masyarakat desa, dan sebanyak mungkin anggota masyarakat desa lainnya yang berminat untuk hadir. Fasilitator dalam musyawarah desa sosialisasi adalah Fasilitator Kecamatan (FK) atau Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa berasal dari swadaya desa dan masyarakat.

Pelaku tingkat desa, seperti kader desa, kader teknik dan TPK yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, selanjutnya akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya pelaku tingkat desa akan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Adapun hasil yang diharapkan dalam pelatihan pelaku tingkat desa adalah :

- a. Pelaku tingkat desa memahami tentang latar belakang, tujuan prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM.
- b. Pelaku tingkat desa mengetahui dan memahami peran dan tugasnya.
- c. Pelaku tingkat desa terampil dalam melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM, termasuk perencanaan desa secara partisipatif.
- d. Pelaku tingkat desa terampil memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM secara mandiri.

- e. Pelaku tingkat desa menguasai administrasi dan pelaporan yang diperlukan.
- f. Pelaku tingkat desa mampu menyusun dan mempunyai rencana kerja untuk melakukan peran dan tugasnya.

Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan ditingkat dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun sebagai berikut:

Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan penduduk desa dalam kategori tingkatan ekonomi menurut kriteria dan istilah setempat seperti misalnya kategori kelompok masyarakat kaya menengah dan miskin. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasikan rumah tangga-rumah tangga yang ada di desa dan selanjutnya di tuangkan dalam sebuah peta.

Langkah-langkah penentuan klafikasi kesejahteraan sebagai berikut: masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas desa mereka. Misalnya ada anggota masyarakat yang kaya, menengah atau miskin (klasifikasinya tidak harus seperti ini, terserah masyarakat sendiri termasuk istilah yang akan digunakan). Jenis tingkatan yang disebutkan masyarakat harus dicatat. Masyarakat yang hadir dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai jumlah tingkatan kesejahteraan yang telah diungkapkan sebelumnya (pembagian dilakukan secara acak) misalnya : satu kelompok yang membahas tentang masyarakat kaya, satu kelompok yang

membahas tentang masyarakat menengah dan satu kelompok lagi yang membahas masyarakat miskin. Jika klasifikasi kesejahteraan ada tiga tingkatan, maka kelompok juga dibagi dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok di minta membuat sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya (gambar rnengacu pada realitas yang ada dimasyarakat). Selesai membuat gambar, pandu setiap kelompok untuk mendiskusikan ciri-ciri tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. Ciri-ciri yang disepakati kemudian dituliskan dalam kertas, selesai membuat klasifikasi tingkatan kesejahteraan masyarakat selanjutnya fasilitasi peserta pertemuan dusun untuk membuat peta sosial. Tujuan penyusunan peta sosial adalah : Mengidentifikasi dan menandai rumah-rumah di dusun berdasarkan hasil kriteria kesejahteraan yang telah dibuat sebelumnya.

Mengidentifikasi kondisi geografis, sumber daya alam fasilitas umum dan potensi desa lainnya. Hasil pemetaan sosial dipakai untuk menggali gagasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, serta dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam melaksanakan atau memantau tahapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), seperti: penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa.

Peta sosial ini selanjutnya digunakan sebagai alat bantu dalam menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas keluarga miskin. Pertemuan penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok masyarakat atau di dusun untuk menentukan gagasan-gagasan kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan

masyarakat. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tetapi lebih jauh lagi berupa gagasan-gagasan dalam memandang bagaimana masa depan desanya, apa saja program jangka pendeknya, apa saja yang menjadi program jangka panjangnya. Kelompok yang dimaksud dalam penggalian gagasan adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan berlatar belakang wilayah seperti RT/RW/RK/dusun/kampung atau yang lainnya. kelompok-kelompok informal dimasyarakat seperti : kelompok arisan, kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan, dan pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat. Jadi untuk efektifitasnya, maka kegiatan penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (baik formal maupun informal). Dari kegiatan penggalian gagasan ditingkat dusun ini, terhimpun begitu banyak jenis usulan kegiatan yang akan dibahas pada musyawarah desa, yang mana pada dasarnya untuk menetapkan prioritas jenis kegiatan dari jenis usulan yang ada.

Musyawarah desa khusus perempuan dihadiri oleh perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke forum musyawarah desa penetapan usulan untuk disyahkan sebagai bagian dari usulan desa.

Musyawarah desa khusus perempuan dilakukan untuk mendapatkan usulan dari kelompok perempuan. Ada kecenderungan gagasan perempuan lebih nyata menggambarkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kondisi kemiskinan, karena merekalah yang seringkali merasakan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu metode atau teknik yang digunakan lebih pada untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang seringkali dirasakan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam musyawarah khusus perempuan adalah analisis penyebab kemiskinan yang tujuannya adalah : untuk mengajak perempuan mencari permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar permasalahannya untuk menentukan gagasan kegiatan apa saja yang diperkirakan dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok perempuan.

Musyawarah desa penetapan usulan merupakan forum pertemuan masyarakat tingkat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat kelompok dan tingkat dusun. Pembahasan pada musyawarah desa, pada dasarnya untuk penetapan usulan dari penggalian gagasan apakah kegiatan sarana prasarana, Simpan Pinjam Perempuan, Usaha Ekonomi Produktif atau Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Kesehatan atau pendidikan). Jadi dalam musyawarah antar desa prioritas usulan adalah forum di tingkat kecamatan prioritas kegiatan adalah Bidang sarana Prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), maka kegiatan ini yang merupakan penetapan usulan yang didanai oleh Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang layak dan mendesak untuk dilaksanakan di Desa Sabak Permai Kabupaten Siak Sri Indrapura (Menurut Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2005).

Setelah semua tahapan-tahapan dari perencanaan di atas dilalui pemilihan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di desa Sabak Permai adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana (pagar kawat perkebunan masyarakat). Untuk mengetahui tanggapan responden tentang perencanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) baik bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maupun bidang sarana prasarana dapat dilihat pada Penjelsan dibawah berikut ini : Penjelasan wawancara Tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan (PNPM) Di Desa Sabak Permai.

Tabel V.5. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Sosialisasi Perencanaan

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	30	30%
2	Cukup Baik	45	45%
3	Kurang Baik	25	25%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Dari Penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan wawancara Tim Pelaksana tentang sosialisasi perencanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebanyak 30 orang atau 30 % yang mengatakan “baik” hal ini di tunjukan oleh karena dalarn melakukan sosialisasi

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kegiatan layak untuk dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat desa Sabak Permai. Dan 45 orang atau 45% yang mengatakan “Cukup Baik” di tandai tim pelaksana belum sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dan 25 orang atau 25% pernyataan responden mengatakan “Kurang Baik”. Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden maka masyarakat salah artikan tentang penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mana dana ini khusus untuk ibu-ibu yang mempunyai usaha sehingga dengan adanya dana pinjaman ini akan dapat mengembangkan usaha dan sebagai tambahan modal, tetapi dana ini di bagi rata kepada seluruh anggota SPP tersebut yang berjumlah 30 orang.

Tabel V.6. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Pelatihan Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	25	25%
2	Cukup Baik	46	46%
3	Kurang Baik	29	29%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.6 tersebut di atas, menggambarkan bahwa dari 100 responden, sebanyak 25 responden atau 25% dari pernyataan responden yang mengatakan ‘Baik’, yaitu dalam artian bahwa pelatihan perencanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai ada tanggapan wawancara yang mengatakan baik di tunjukkan oleh pelatihan kegiatan

sarana prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang akan dilaksanakan dapat menunjang dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sabak Permai khususnya dan juga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat lain. Tanggapan responden yang mengatakan “Cukup Baik” sebanyak 46 orang atau 46% ini ditandai oleh dalam pelatihan terjadinya ego kedusunan yaitu lebih mengutamakan kepentingan kedusunan. Dan begitu juga dengan responden yang mengatakan “Kurang Baik” dengan jumlah responden 29 orang atau 29% dengan berdasarkan responden bahwa tidak adanya musyawarah khusus perempuan yang dilakukan dan pelatihan yang dilakukan dimasyarakat.

Tabel V.7. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Sosialisasi Perencanaan

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	27	27%
2	Cukup Baik	33	33%
3	Kurang Baik	40	40%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.7 di atas, bahwa tanggapan responden tentang penggalan gagasan perencanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebanyak 27 orang atau 27% yang mengatakan “Baik”, ini ditunjukkan oleh penilaian wawancara tentang penggalan gagasan perencanaan kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adanya musyawarah yang dilakukan oleh tim pelaksana kepada masyarakat dan penggalan gagasan di tingkat desa untuk mendapat informasi tentang kebutuhan

pembangunan di desa Sabak Permai tersebut serta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran serta program ini sangat diterima baik oleh masyarakat dan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat Sabak Permai. Dan 33 orang atau 33% tanggapan responden tim pelaksana dan masyarakat tentang penggalian gagasan perencanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mengatakan “cukup baik”. Dan sebanyak 40 orang atau 40% dari pernyataan responden masuk kedalam kategori “kurang baik” dalam artian bahwa tim pelaksana dan masyarakat tentang penggalian gagasan perencanaan kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang menilai bahwa dalam penggalian gagasan serta pemilihan jenis kegiatan yang dipilih tidak memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat dan dalam penggalian gagasan pemilihan jenis kegiatan kurang dilibatkan kaum perempuan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musyawarah antar desa penetapan usulan dan musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa SMusyawarah Antar Desa (MAD) serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan dimana masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat. Masyarakat desa prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin, bila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau tenaga ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa.

Untuk pencairan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), mengikuti proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Dimana tahapan-tahapan proses pencairan dana tersebut dilakukan yaitu terlebih dahulu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) setelah Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat, lalu diajukan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan (FK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk diperiksa lebih lanjut apakah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan dan apabila semua cocok maka barulah dilakukan proses pencairan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di tingkat desa. Pada tahap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kegiatan ini pada dasarnya penetapan jenis kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ditetapkan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik (Simpan Pinjam Perempuan). Adapun kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sarana prasarana pagar kawat perkebunan sepanjang 1100 M yang menelan biaya sebesar Rp 37.804.500 dan swadaya masyarakat Rp 6.400.000 dengan masa kerja 2 (dua) bulan atau 60 hari kerja. Dalam hal ini pencairan dana dilaksanakan dua (2) tahap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 8 : Dana Kegiatan Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Bidang Sarana Prasarana Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura.

No	Nama Dana	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	Dana PNPM	23.889.000	Pencairan Dana PNPM tahap pertama
2	Dana PNPM	13.915.500	Pencairan Dana PNPM tahap kedua
Jumlah keseluruhan		37.804.500	

Sumber : Kantor Kepala Desa Sabak Permai 2010

- b. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam hal ini dinamakan anggota wirid yasin ibu-ibu desa Sabak Permai dengan jumlah dana sebesar Rp 10.000.000. Kegiatan program pengembangan kecamatan ini khusus di alokasikan untuk 30 IRT (ibu rumah tangga) dengan besar pinjaman Rp 300.000 /IRT.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi kelompok miskin. Pengumuman ditempel di setiap sudut desa dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana secara bertahap kepada masyarakat. Musyawarah pertanggungjawaban minimal dilakukan dua kali yaitu setelah memanfaatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahap pertama dan tahap kedua. Sebelum diadakan musyawarah desa

pertanggungjawaban, TPK harus menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) pencairan dana I dan ke II. Sebelum pertemuan musyawarah desa pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban dana secara tertulis harus sudah ditempel dipapan informasi dan disebarluaskan kepada masyarakat desa.

Tujuan dari musyawarah desa pertanggungjawaban ini adalah untuk menyampaikan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tentang penerimaan dan penggunaan dan status kemajuan dari tiap kegiatan tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan dan penilaian terhadap kinerja dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan upaya peningkatan serta pembuatan rencana kerja pada periode selanjutnya (Menurut Buku petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2005). Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan program pengembangan Kecamatan (PNPM) dapat dilihat pada tabel V.9 ini.

Tabel V.9. Jumlah Responden Tentang Pencairan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	40	40%
2	Cukup Baik	35	35%
3	Kurang Baik	25	25%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Dari tabel V.9 di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pencairan dana pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai, yaitu sebanyak 40 orang atau 40%

yang mengatakan “baik”. Berdasarkan pernyataan responden mengatakan tentang penggunaan dana telah sesuai dengan rencana serta mencapai hasil yang memuaskan dan tepat waktu. Pihak pelaksana yang menilai pemilihan jenis kegiatan sarana prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan pemilihan kegiatan yang tepat dan layak untuk dilaksanakan dan dapat mendukung perekonomian masyarakat Sabak Permai dan dapat memberikan dampak kepada desa tetangga, dan 35 orang atau 35% responden Tim Pelaksana mengatakan “Cukup Baik” berdasarkan tanggapan responden karena pemilihan jenis kegiatan sarana prasarana pagar kawat perkebunan masyarakat hanya dilakukan di satu dusun saja sementara tiap dusun desa Sabak Permai mempunyai lahan pertanian yang harus diperhatikan. Sedangkan berdasarkan kuisisioner tanggapan responden masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebanyak 25 orang 25% yang mengatakan “kurang baik”, ini berdasarkan tanggapan responden masyarakat menilai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana kurang berjalan dengan baik dan kurang membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya dan dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana yaitu dilaksanakan oleh masyarakat Sabak Permai sendiri dan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan dan kebutuhan tenaga kerja telah terbuka kepada seluruh warga desa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh

dapat dikatakan dalam kategori “baik” oleh masyarakat yang mengurus jasa pelayanan tersebut.

Tabel V.10. Jumlah Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban Dana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	37	37%
2	Cukup Baik	46	46%
3	Kurang Baik	17	17%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.10 di atas bahwa tanggapan responden tentang pengadaan tenaga kerja yang mengatakan “Baik” berjumlah sebanyak 37 orang atau 37%, ini ditunjukkan bahwa masyarakat menilai pengadaan tenaga kerja kegiatan sarana prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pengembangan Kecamatan (PNPM) telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dan 46 orang atau 46% mengatakan “cukup baik”, karena ditandai dengan terlalu sedikitnya jumlah pinjaman, sehingga tidak dapat untuk dikembangkan usaha ekonomi produktif dan terjadinya tumpang tindih program pemerintah yang dilaksanakan di desa Sabak Permai dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana tidak ditempel dipapan informasi. Dan 17 orang atau 17% responden masyarakat yang mengatakan “Kurang Baik”, sehingga masyarakat menganggap bahwa dengan adanya tumpang tindih program pemerintah tersebut menyebabkan tidak berjalan secara optimal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) terutama bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan tidak berlanjut lagi kegiatan SPP di desa Sabak Permai tersebut dan kurang aktif pendamping desa dalam mengusulkan kegiatan untuk periode berikutnya.

Dari pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pertanggungjawaban dana pelaksana program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh dapat dikategorikan “cukup baik”, karena ditandai dengan terlalu sedikitnya jumlah pinjaman, sehingga tidak dapat untuk dikembangkan usaha ekonomi produktif dan terjadinya tumpang tindih program pemerintah yang dilaksanakan di desa Sabak Permai dan tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana tidak ditempel dipapan informasi.

3. Pelembagaan

Pengelolaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) harus mampu memberi dampak perubahan positif dan keberlanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara benar.

Hasil-hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berupa Sarana Prasarana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan asset bagi masyarakat yang harus di pelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti : tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat lagi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk tahun berikutnya.

Proses pemeliharaan kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pemeliharaan, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hasil yang diharapkan dari upaya pemeliharaan kegiatan adalah :

- a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat.
- b. Menjamin berfungsinya secara berlanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat serta pengembangan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan kemampuan masyarakat sendiri.
- c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat.
- d. Meningkatkan berfungsinya kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program.

- e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sistem pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk menjamin terjadinya pemeliharaan kegiatan yang harus dilakukan adalah tim pemelihara segera dibentuk dan dilatih paling lambat setelah Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan, untuk setiap jenis sarana prasarana telah dibuat daftar penanggung jawab dan penetapan iuran pemeliharaan (Menurut Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2005).

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel V.11 di bawah ini tanggapan responden tentang pemeliharaan atau pelestarian kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai berikut :

Tabel V.11 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	30	30%
2	Cukup Baik	30	30%
3	Kurang Baik	40	40%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Pada Tabel V.11 di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang hasil kegiatan pelebagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), berdasarkan kuisisioner ada sebanyak 30 orang atau 30% yang mengatakan “baik”, yaitu dalam artian bahwa tim pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik serta telah memberi motivasi kepada masyarakat untuk lebih giat untuk memelihara asset yang ada yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sarana prasarana pagar kawat perkebunan masyarakat desa Sabak Permai. Dari hasil wawancara mulai dari hasil kegiatan telah diberikan pengarahan oleh tim pelaksana kepada masyarakat, adapun hasil kegiatan tersebut dari segi prasarana (pagar kawat) adanya peningkatan penghasilan masyarakat dibandingkan sebelum adanya sarana pagar kawat tersebut. Sebanyak 30 orang atau 30% responden tim pelaksana mengatakan “cukup baik”, karena desa Sabak Permai kurang berhasil mengelola terutama kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ditandai dengan tidak berlanjutnya dana SPP untuk tahun berikutnya, tidak adanya tim penulis usulan, membuat proposal untuk mendapatkan dana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk tahun berikutnya.

Sedangkan sisanya sebanyak 40 responden atau 40% dari pernyataan responden masuk dalam kategori “kurang baik”, dalam artian bahwa dana simpan Pinjam Perempuan (SPP) relatif kecil, sehingga tidak dapat dibagi rata dana kegiatan tersebut kepada anggota IRT ibu-ibu wirid yasin.

Dari pernyataan responden di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dengan masalah-masalah yang dikemukakan oleh masyarakat setempat tidak menikmati kesejahteraan hidup yang berada di Desa Sabak Permai hal ini

“kurang baik” dikarenakan disalah artikan dana Simpan Pinjam Perempuan terhadap masyarakat ibu-ibu rumah tangga.

Tabel V.12 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Proses Pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	30	30%
2	Cukup Baik	43	43%
3	Kurang Baik	27	27%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.12 di atas, bahwa tanggapan responden tentang proses pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dari kuisioner yang disebarkan ada 30 orang atau 30% responden mengatakan “baik”, kuisioner dan observasi yang peneliti lakukan kegiatan sarana prasarana (pagar kawat) sangat berjalan dengan baik ditandai dengan adanya pemeliharaan yaitu berupa gotong royong masyarakat tiap bulannya dan disertai iuran sebesar Rp. 1.000;/anggota, uang ini digunakan untuk biaya perawatan pagar kawat perkebunan apabila terjadi kerusakan. Sementara 43 orang atau 43% responden mengatakan “cukup baik” yang ditandai dari segi kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berlanjut untuk tahun berikutnya yang disebabkan banyaknya partisipasi masyarakat (kelompok perempuan anggota wirid yasin) desa Sabak Permai terhadap dana SPP-PNPM tersebut. Dan 27 orang atau 27% responden mengatakan “kurang baik”, dari segi positifnya kegiatan sarana

prasarana masih terpelihara dan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, sedangkan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga tidak terjadi kemacetan tetapi tidak berlanjutnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disebabkan adanya tumpang tindih program pemerintah yang berbentuk pinjaman dan pendamping desa juga tidak mengusulkan kepada kecamatan untuk kegiatan tahun berikutnya.

Tabel V.13 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Sistem Pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	25	25%
2	Cukup Baik	40	40%
3	Kurang Baik	35	35%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tanggapan responden Tim Pelaksana dan masyarakat tentang sistem pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang mengatakan “baik” sebanyak 25 orang atau 25% terlaksananya kegiatan dengan baik dan lancar yaitu kegiatan prasarana pagar kawat yang sangat mempunyai dampak positif bagi masyarakat Sabak Permai, dengan adanya pemilihan jenis kegiatan sarana prasarana pagar kawat ini telah meningkatkan hasil pertanian masyarakat setempat karena tidak ada lagi binatang ternak yang mengganggu masyarakat tersebut. Adapun tanamannya adalah Jagung, Kangkung, Bayam, Ubi, dan lain-lain sebagainya. Dan sebanyak 40 orang atau 40% responden mengatakan “cukup baik”. Sebagaimana tanggapan responden bahwa dari segi Simpan Pinjam

Perempuan minimal telah dapat membantu masyarakat untuk keperluan rumah tangga walaupun sebenarnya belum untuk dijadikan modal usaha. Adapun kendalanya kurangnya partisipasi masyarakat dan tumpang tindihnya program pemerintah serta terjadinya dana pinjaman yang relatif kecil. Dan 35 orang atau 35% mengatakan “kurang baik”, karena desa Sabak Permai tidak dapat dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk tahun berikutnya, karena faktor penghambatnya kurangnya pendamping lokal untuk mengusulkan pinjaman dana kepada tim pelaksana di tingkat kecamatan.

4. Pengendalian

Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM bertujuan :

- a. Menjaga setiap proses PNPM selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan PNPM.
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.

- e. Menjaga kualitas dan setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian PNPM adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara objektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku PNPM di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah.
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan.
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pemantauan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM. Selain itu pemantauan juga ditujukan untuk melihat kinerja semua pelaku PNPM.

Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/pemeliharaan. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM dan masyarakat.

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan diberbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor, dan lain-lain.

Pelaporan merupakan proses penyampaian data atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai Upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan informasi dari lapangan atau desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif maka materi yang disajikan harus memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan, pencapaian sasaran atau target dari kegiatan, realisasi biaya,

kendala dan permasalahan serta gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk pembinaan dan pemberian dukungan teknis kepada pelaku PNPM dan masyarakat. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh FK/fasilitator teknik atau pendamping lokal pada setiap kunjungan ke desa untuk pemeriksaan administrasi dan hasil pelaksanaan di desa-desa. Mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. hal-hal yang diperiksa antara lain : proses pelaksanaan tiap jenis kegiatan, ketersediaan dan kualitas bahan / material, jumlah angkatan kerja yang menunjang kelancaran pekerjaan, administrasi dan rencana kerja TPK, tingkat partisipasi masyarakat, realisasi sumbangan masyarakat, penggunaan papan informasi dan papan nama proyek, dan lain-lain (Menurut Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun 2005).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.9 tanggapan responden tentang pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai berikut :

Tabel V. 14 : Jumlah Responden Tentang Pemantauan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	28	28%
2	Cukup Baik	41	41%
3	Kurang Baik	31	31%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Dari tabel V. 14 berdasarkan tanggapan responden tentang pemantauan pengendalian kuisioner peneliti di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 28 orang atau 28% responden menyatakan tentang pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mengatakan “baik”, dalam artian responden menunjukkan bahwa adanya kunjungan langsung kelapangan dari tim pelaksana baik dari tingkat kecamatan maupun di tingkat desa mengenai pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di desa Sabak Permai serta adanya laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh tim pelaksana dari masyarakat tiap tahap pelaksanaannya, dimana dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap dana kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai. Dan ada 41 orang atau 41% responden yang menyatakan “cukup baik” tentang pemantauan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ditandai oleh masih adanya tim pelaksana yang kurang aktif dalam melakukan pemeriksaan dan rendahnya kualitas bahan atau material sehingga

prasarana pagar kawat tersebut mudah rusak jadi untuk itu harus ada pemeliharaan rutin supaya terjaga kelestariannya dan 31 orang atau 31% dari pernyataan responden yang menyatakan “kurang baik”, yang di tandai oleh rendahnya kualitas bahan dan material sarana prasarana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Tabel V. 15 : Jumlah Responden Tentang Pelaporan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	23	23%
2	Cukup Baik	27	27%
3	Kurang Baik	50	50%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.15 di atas, bahwa tanggapan responden terhadap pelaporan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai yang mengatakan “baik” ada 23 responden atau 23%, ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai tim pelaksana telah mampu menjalankan tugasnya dan melakukan pelaporan langsung dan pemeriksaan langsung ke lapangan dimana tempat pelaksanaan PNPM dilaksanakan jadi dengan adanya kunjungan tersebut masyarakat mendapat arahan dari tim pelaksana kegiatan bagaimana kegiatan PNPM kedepannya. Dan ada 27 orang responden atau 27% responden yang menyatakan pelaporan pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) “cukup baik”, ini juga menunjukkan masih

ada sebagian tim pelaksana belum maksimal melaksanakan tugasnya karena terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan ketingkat kecamatan oleh tim pelaksana kegiatan.

Sedangkan sisanya sebanyak 50 responden atau 50% dari pernyataan responden masuk dalam kategori “kurang baik” dalam artian bahwa pelaporan dana tersebut tidak transparan disebabkan kurangnya pengawasan dari tim pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Tablet V. 16 : Jumlah Responden Tentang Pemeriksaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Baik	20	20%
2	Cukup Baik	34	34%
3	Kurang Baik	46	46%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Olahan Hasil 2011

Berdasarkan tabel V.16 di atas, menggambarkan bahwa dari 20 orang responden atau 20% yang menilai tentang pemeriksaan pengendalian Program Pengembangan Kecamatan (PNPM) yang mengatakan “baik”, ini ditandai dengan tersebarnya pelaporan keuangan atau dana kegiatan PNPM kepada masyarakat setiap pelaksanaan PNPM atau adanya papan informasi tentang laporan keuangan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Sabak Permai. Berdasarkan kuisisioner peneliti dengan responden tim pelaksana kegiatan dan masyarakat tentang pemeriksaan pengendalian Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maka dapat kita jumlahkan yaitu sebanyak 34 orang responden atau 34% mengatakan “cukup baik”, dari kuisisioner dan observasi peneliti lakukan ditunjukkan oleh setiap pemeriksaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana dan diketahui masyarakat setempat dan pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar dan tidak ada terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap dana PNPM. Sementara itu, ada 46 orang responden atau 46% yang mengatakan “kurang baik”. Hal ini ditunjukkan bahwa masih ada tim pelaksana dan pengawas yang tidak mau tahu dengan proses pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di desa Sabak Permai, adapun kegiatannya tersebut adalah simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan sarana prasarana pagar kawat perkebunan masyarakat sepanjang 1100 M.

Berdasarkan uraian-uraian dari keempat indikator Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, dapat dilihat pada tabel V. 17 berikut ini.

Tabel V. 17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Daftar Pernyataan	Kriteria pernyataan			Persentase
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	V.5. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Sosialisasi Perencanaan	30 (30%)	45 45%	25 25%	100 (100%)
2	V.6. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Pelatihan Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	25 (25%)	46 (46%)	29 (29)	100 (100%)
3	V.7. Jumlah Responden Mengenai Tim Pelaksana Tentang Sosialisasi Perencanaan	27 (27%)	33 (33%)	40 (40%)	100 (100%)
4	V.9. Jumlah Responden Tentang Pencairan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	40 (40%)	35 (35%)	25 (25%)	100 (100%)
5	V.10. Jumlah Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban Dana Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	37 (37%)	46 (46%)	17 (17%)	100 (100%)
6	V.11 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Hasil Kegiatan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai	30 (30%)	30 (30%)	40 (40%)	100 (100%)

7	V.12 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Proses Pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai	30 (30%)	43 (43%)	27 (27%)	100 (100%)
8	V.13 : Jumlah Tanggapan Responden Tentang Sistem Pemeliharaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai	25 (25%)	40 (40%)	35 (35%)	100 (100%)
9	V. 14 : Jumlah Responden Tentang Pemantauan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai	28 (28%)	41 (41%)	31 (31%)	100 (100%)
10	V. 15 : Jumlah Responden Tentang Pelaporan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai	23 (23%)	27 (27%)	50 (50%)	100 (100%)
11	V. 16 Jumlah Responden Tentang Pemeriksaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di desa Sabak Permai	20 (20%)	34 (34%)	46 (46%)	100 (100%)
Jumlah		315	420	365	1100
Persentase (%)		28,63%	38,18%	33,18%	110000%

Sumber : Data Olahan 2010

Dapat kita lihat pada Tabel V. 17 di atas yang merupakan rekapitulasi dari empat indikator Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat

dikategorikan **Cukup Baik**, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata dari indikator terlihat pada kategori penilaian baik (terlaksana) berjumlah 315 orang dengan persentase 28,63 % ini dapat dinilai dari PNPM layak untuk dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat desa Sabak Permai, dan kategori penilaian Cukup Baik (cukup terlaksana) berjumlah 420 orang dengan persentase 38,18 % berdasarkan wawancara peneliti dengan responden mengatakan masih kurangnya sosialisasi dari tim pelaksana serta yang berkategori penilaian kurang baik (kurang terlaksana) berjumlah 365 orang dengan persentase 33,18 %. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil riset, Analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan “**cukup terlaksana**,” di karenakan dengan penilaian(65,15%).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Berdasarkan tanggapan responden bahwa proses perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berjalan dengan baik, mulai dari sosialisasi, penggalan gagasan penulisan usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa semuanya sudah dilalui. Adapun pemilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan di desa Sabak Permai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana. Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di berikan kepada anggota wirid yasin ibu-ibu desa Sabak Permai. Selama perguliran dana

berlangsung pada umumnya ibu-ibu yang memperoleh dana SPP ini tidak memberikan umpan balik terhadap peningkatan ekonomi, disebabkan dengan jumlah dana terlalu sedikit dan juga terjadinya tumpang tindih program pemerintah yang masuk ke desa Sabak Permai yang mana mempunyai dana lebih besar dibanding dana SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

2. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan berjalan dengan baik, berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan kegiatan adalah bidang sarana prasarana dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam pelaksanaannya terjadi masalah dalam bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana terjadi tumpang tindih Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan program pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, jadi dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut kurang berhasil yang ditandai dengan tidak dapat dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk tahun berikutnya. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan azas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maka perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia seperti : Masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan, dan seluruh pelaku PNPM lainnya. Karena itu, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

3. Pelembagaan

Hasil-hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berupa Sarana Prasarana, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan asset bagi masyarakat yang harus di pelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti : tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat lagi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk tahun berikutnya. Maka ini terjadi pada kegiatan simpan Pinjam Perempuan (SPP) desa Sabak Permai karena mereka kurang terangsang dengan adanya dana SPP tersebut untuk mengembangkan usaha.

4. Pengendalian

Proses pengendalian PNPM dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan ini semua berjalan dengan baik, yang tujuannya untuk mengetahui data dan informasi dan untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan dan untuk mengetahui penyimpangan atau penyelewengan terhadap kegiatan tersebut.

Jenis kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sarana prasarana dalam hal ini adalah pagar kawat perkebunan masyarakat, adapun tanaman yang ada di dalamnya adalah berupa sayur-sayuran seperti : Tanaman Kangkung, Ubi, Jagung, cabe dan lain-lain. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) segi pelaporan

tidak adanya terdapat tunggakan, ini di sebabkan jumlah pinjaman yang relatif kecil dari 30 orang anggota wirid yasin dengan jumlah dana Rp 10.000.000, maka jumlah dana potongnya hanya Rp 300.000, maka pembayaran tiap bulannya hanya Rp 25.000. yang jadi masalah adalah sebagaimana tujuan PNPM untuk dapat menggunakan dana tersebut bukan untuk keperluan konsumtif saja, tetapi untuk keperluan pengembangan usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kegiatan sarana prasarana yaitu maka desa Sabak Permai pemilihan jenis kegiatan pagar kawat perkebunan, yang tujuannya adalah untuk menghindari tanaman seperti Kangkung, Ubi, Jagung, Cabe dan lain-lainnya terhindar dari gangguan binatang ternak. Akan tetapi dalam pelaksanaan pagar kawat ini terjadi hanya dilakukan disatu dusun saja, sementara tiap-tiap dusun mempunyai lahan perkebunan, di satu sisi memang sangat baik dilaksanakan karena dapat meningkatkan hasil perkebunan masyarakat, tetapi disisi lain tidak seimbangya pembangunan yang dilaksanakan di desa Sabak Permai.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, tentang Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat dikategorikan dengan pernyataan masyarakat *Cukup Baik*, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata dari indikator terlihat pada kategori penilaian baik (terlaksana) berjumlah 315 orang dengan persentase 28,63 % ini dapat dinilai dari PNPM layak untuk dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat desa Sabak Permai, dan kategori penilaian Cukup Baik (cukup terlaksana) berjumlah 420 orang dengan persentase 38,18 % berdasarkan wawancara peneliti dengan responden mengatakan masih kurangnya sosialisasi dari tim pelaksana serta yang berkategori penilaian kurang baik (kurang terlaksana) berjumlah 365 orang dengan persentase 33,18 %. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil riset, Analisis pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan *cukup baik*.

2. Selanjutnya hambatan yang terjadi di desa Sabak permai Kecamatan Sabak Auh dalam melakukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kepada masyarakat sehingga terjadi tumpang tindih program pemerintah serta terjadinya dana pinjaman yang relatif kecil dan sulit untuk dijadikan modal usaha.

6.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas maka penulis berusaha untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat, antara lain :

1. Dalam melaksanakan suatu program pemerintah sebaiknya tim pelaksana lebih giat memotivasi masyarakat, seperti yang terjadi pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), berdasarkan informasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan, bahwa tidak adanya usulan permohonan kegiatan dari tim penulis usulan permohonan kegiatan dari tim penulis usulan atau pendamping desa atau dari desa itu sendiri untuk tahun berikutnya.
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Sabak Permai, sebaiknya untuk tercapainya sasaran dan tujuan PNPM pendamping lokal atau fasilitator desa lebih giat dalam mensosialisasikan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang program pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, alfabeta.
- Dunn, Willian, N. 1995. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Hani dita.
- Dunn, Willian, N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan, 1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta, Karunika.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Lubis, Ibrahim, 1985. *Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- MS. Sudjarwo, 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Mandar Maju.
- Mukijat, 2000. *Fungsi Manajemen*, Bandung, Mandar Maju.
- Nazir, Moh.2003. *Metode Penelitian*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta Elek Media Komputindo.
- Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori dan Praktis Pemerintah dan Daerah Otonom*. Jakarta Gramedia Press.
- Riyadi dan Dedi Supriyadi Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategis Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta Gramedia.
- Siagian Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sufian , 2003. *Administrasi Organisasi & Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- _____, 2003. *Administrasi Manajemen Dan Pembangunan*. Pekanbaru, UIR Press.
- Sufian, 2005. *Manajemen Strategis*. Pekanbaru, UIR Press.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sule Tisnawati, Ernie dan Saefullah, Kurniawan, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Prenada Media.

Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta LP3ES.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru, UIR

Dokumentasi

Buku Pedoman Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK), 2005, Jakarta.

Buku Pedoman Usulan Penelitian (UP) Laporan Hasil Penelitian (Skripsi) Laporan Kertas Kerja Mahasiswa (LKKM), 2006. FISIPOL Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.